

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-077.01.1.653910/2013**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

- | | | |
|---------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara / Lembaga | : (077) | MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (653910) | MAHKAMAH KONSTITUSI RI |
| Sebesar | : Rp. | 199.840.654.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	199.840.654.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA I | (018) Rp. | 199.840.654.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk MAHKAMAH KONSTITUSI RI, MAHKAMAH KONSTITUSI RI.
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 05 Desember 2012
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

HERRY PURNOMO
NIP.195305081976031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-077.01.1.653910/2013

Satker : (653910) MAHKAMAH KONSTITUSI RI

01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	Rp.	82.844.465.000
01.3365	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	Rp.	1.688.321.000
01.3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi	Rp.	19.309.126.000
01.3367	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan	Rp.	26.281.772.000
01.3368	Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Rp.	1.970.440.000
01.3369	Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan	Rp.	33.594.806.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Rp.	36.600.000.000
02.3371	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Rp.	36.600.000.000
06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Rp.	80.396.189.000
06.3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Walikota, dan Perkara Lainnya	Rp.	80.396.189.000
